



Pemkot Bereskan Tumpukan di Depo

Angkut 500 Ton Sampah Dalam Semalam

YOGYA, TRIBUN - Problem penumpukan sampah di sejumlah depo di Kota Yogyakarta mulai dibersihkan pada Kamis (30/5/24) malam. Sekitar pukul 23.00, Penjabat Wali Kota Yogyakarta, Sugeng Purwanto, didampingi Sekda Aman Yuradijaya dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sugeng Darmanto, turun langsung memantau pembersihan tumpukan sampah di Depo Mandala Krida.

Wali Kota mengatakan, dalam pembersihan ini, sebanyak 10 armada truk milik DLH Kota Yogyakarta dikerahkan untuk mengangkut tumpukan sampah yang berada di depo tersebut. Selain Depo Mandala Krida, pembersihan tumpukan sampah juga dilakukan di depo lainnya, misalnya Depo Uloroloyo, Pengok, hingga Kotabaru.

"Yang sudah bersih adalah Depo Pengok, selanjutnya kita akan melakukan pembersihan di Depo Tompeyan dan Depo Kotabaru," tandasnya.

Diperkirakan, sampah yang menumpuk di depot depot tersebut mencapai

Ini adalah komitmen Pemkot Yoga. Kami akan terus berupaya serta mencari solusi terbaik untuk menangani masalah sampah.

750 ton, sehingga mau tak mau harus segera ditempuh upaya eksekusi. Melalui giat pembersihan itu, lanjutnya, dalam satu malam, petugas DLH Kota berhasil mengangkut lebih kurang 500 ton sampah.

"Nanti (pengelolaannya) kita optimalkan di tiga TPS 3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle) milik Pemkot," cetus Sugeng.

Ia mengakui, saat ini memang baru TPS 3R Nitikan yang bisa beroperasi penuh,

sementara TPS 3R Kranon dan Karangmiri masih di kisaran 80 persen. Namun, ia optimistis, tumpukan sampah di depo yang belakang-an mendapat sorotan tajam dari publik dapat segera dirampungkan.

"Ini adalah komitmen Pemkot Yoga. Kami akan terus berupaya serta mencari solusi terbaik untuk menangani masalah sampah," tandasnya.

Diperbaiki Dari Hulu
 Pakar UGM, Prof Chandra Wahyu Purnomo menyatakan, bahwa krisis sampah di Yogyakarta telah mencapai tahap darurat. Hal ini diperparah dengan minimnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah dan sistem pengolahan yang belum memadai.

Pengelolaan sampah dapat disebut sebagai 'pintu masuk' dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan, karena sampah merupakan isu multidisipliner yang berdampak pada berbagai aspek di masyarakat dan juga ekonomi.

Dosen Departemen Teknik Kimia Fakultas Teknik UGM ini turut menyoroti tata kelola sampah di Jogja masih dalam tahap darurat, karena penanganannya belum terselesaikan hingga kini.

"Meskipun peraturan tentang persampahan itu banyak sekali, mulai Undang-Undang sampai Peraturan Daerah, tapi untuk sistem pengolahan kita masih tertinggal dengan negara lain. Terlebih, di Jogja kita masih bertumpu dengan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Piyeungan," ujar Chandra.

Chandra mengungkapkan, kegagalan dalam membangun ekosistem pengelolaan sampah di Jogja disebabkan tak terbentuknya kesadaran masyarakat sebagai hulu dari permasalahan sampah.

"Harusnya sampah sudah terpilah di hulu, mulai rumah tangga, kantor, pabrik atau industri, dan kampus, karena di hulu saja sudah tercampur, proses pengolahannya akan menjadi berat," ungkapnya. (aka/han)



ANGKUT - Proses pembersihan depo sampah oleh petugas DLH Kota Yoga, Kamis (30/5) malam.

Sudah Masuk Darurat

RISET independen yang dilakukan Dosen Departemen Teknik Kimia Fakultas Teknik UGM Chandra Wahyu Purnomo pada 2021, terkait sampah di Kota Jogja, menunjukkan volume sampah mencapai 300 ton per hari dan ditengarai jumlah tersebut tak mengalami perubahan hingga sekarang, bahkan cenderung meningkat jumlahnya.

"Statusnya sudah darurat, tapi masyarakat belum juga tumbuh kesadaran untuk minimal memilah sampah, jadi-nya malah muncul masalah baru seperti tiba-tiba ada titik baru yang dijadikan tempat pembuangan sampah ilegal," ucapnya.

Chandra menyarankan penanganan sampah di hulu harus diperbaiki dan menjadi prioritas. "Kita harus terus mengedukasi masyarakat, agar memiliki komitmen untuk memilah sampah, kalau perlu ada sanksi sosial

seperti di negara maju," tuturnya.

Tak kalah penting setelah pemilahan, adalah penjadwalan pengumpulan dan pengangkutan dari sumber langsung ke unit pengolahan seperti TPS3R dan TPST, harus terinci dan sistematis agar tidak terjadi konflik kepentingan di dalamnya.

"Pengelolaan sampah mandiri (PSM) juga harus diatur oleh Pemda/Pemdes sehingga bisa menghindari perselisihan dengan Bumdes, yang memang sekarang ada yang ditugaskan untuk mengelola sampah juga," pesannya.

Menurutnya, teknologi pengelolaan sampah berbasis Refuse Derived Fuel (RDF) juga bisa diperhitungkan sebagai solusi untuk menghasilkan bahan bakar yang bisa digunakan untuk meminimalkan penggunaan sampah ke luar DIY. (han)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Januari 2025
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005